

Warisan budaya Sungai Musi: Studi historis peran sungai dalam perkembangan Kota Palembang

Musi River cultural heritage: A historical study of the river's role in the development of Palembang City

Juan Fahirza Putra^{a*}, Rhoma Dwi Aria Yuliantri^b

juanfahirza.2024@student.uny.ac.id, rhoma@uny.ac.id

^a Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Kolombo No. 1, Yogyakarta, 55281, Indonesia

^b Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Kolombo No. 1, Yogyakarta, 55281, Indonesia

*Corresponding email: rhoma@uny.ac.id.

ARTICLE INFO

Received: August 21, 2025
Revised: November 16, 2025
Accepted: December 23, 2025
Published: December 31, 2025

Permalink/DOI

10.17977/um020v19i22025p256-274

Copyright © 2025.
Sejarah dan Budaya
Email: jsb.journal@um.ac.id
Print ISSN: 1979-9993
Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Putra, J.F., & Yuliantri, R.D.A. (2025). Warisan budaya Sungai Musi: Studi historis peran sungai dalam perkembangan Kota Palembang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 19(2), 256-274. <https://doi.org/10.17977/um020v19i22025p256-274>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

The Musi River is a vital element in the historical and cultural development of Palembang City. More than just a transportation and trade route, the river has served as a center of civilization, spirituality, and local identity from the era of the Srivijaya Kingdom to the modern day. This study aims to historically examine the role of the Musi River in shaping the social, economic, and cultural dynamics of Palembang society. The research employs a qualitative approach through literature review, historical document analysis, and interviews with local figures and historians. The findings reveal that the Musi River functioned as a key link in international trade networks during the Srivijaya period, a center for the spread of Islam in the Palembang Sultanate era, and a space for traditional and colonial social-cultural life. In the contemporary era, the river faces challenges such as environmental degradation and shifts in its social function. Nevertheless, various preservation and revitalization efforts based on community participation have been initiated to safeguard this cultural heritage.

KEYWORDS

Musi River; Palembang; history; culture; Srivijaya; cultural heritage

ABSTRAK

Sungai Musi merupakan elemen vital dalam sejarah dan budaya Kota Palembang. Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi dan perdagangan, tetapi juga menjadi pusat peradaban, spiritualitas, dan identitas lokal sejak masa Kerajaan Sriwijaya hingga era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis peran Sungai Musi dalam membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Palembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, dokumentasi arsip sejarah, serta wawancara dengan tokoh lokal dan sejarawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sungai Musi berperan sebagai penghubung utama jaringan perdagangan internasional pada masa Sriwijaya, pusat penyebaran Islam di era Kesultanan Palembang, serta ruang sosial budaya masyarakat tradisional dan kolonial. Dalam perkembangan kontemporer, Sungai Musi menghadapi tantangan degradasi lingkungan dan pergeseran fungsi sosial. Meski demikian, berbagai upaya pelestarian dan revitalisasi berbasis partisipasi masyarakat telah digagas untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya sungai ini.

KATA-KATA KUNCI

Sungai Musi; Palembang; sejarah; budaya; Sriwijaya; warisan budaya

PENDAHULUAN

Sungai Musi merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Sumatra dengan panjang sekitar 750 kilometer, mengalir membelah Provinsi Sumatra Selatan dan secara historis menjadi urat nadi kehidupan bagi Kota Palembang. Sebagai sungai besar yang strategis, Sungai Musi tidak hanya memainkan peran penting dalam bidang transportasi dan ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pembentukan identitas budaya dan sosial masyarakat sejak masa lampau. Berabad-abad sebelum sistem transportasi darat dan udara berkembang, sungai ini telah menjadi jalur utama perhubungan antarwilayah, baik dalam lingkup lokal maupun regional. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional turut mendorong berkembangnya peradaban besar seperti Kerajaan Sriwijaya, yang menjadikan Palembang sebagai pusat maritim dan spiritual Buddha di Asia Tenggara (Coedès, 1968; Miksic, 2013).

Kerajaan Sriwijaya yang berkembang sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 mengandalkan Sungai Musi sebagai tulang punggung perdagangan, pendidikan, dan kekuasaan. Sungai ini bukan sekadar sumber air dan jalur pelayaran, tetapi menjadi bagian dari sistem kosmologi dan struktur sosial masyarakat. Berdasarkan catatan I-Tsing, seorang biksu Tiongkok yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 M, disebutkan bahwa Palembang merupakan pusat pembelajaran agama Buddha dan memiliki infrastruktur pelabuhan yang maju. Artinya, eksistensi Sungai Musi bukan hanya penting secara geografis, tetapi juga mencerminkan kemajuan budaya dan intelektual kawasan tersebut (I-Tsing, 689 M; Hall, 1985).

Setelah Sriwijaya mengalami kemunduran, Palembang tetap menjadi kota penting yang tidak terlepas dari peran strategis Sungai Musi. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam (1659–1823), sungai ini kembali berfungsi sebagai jalur utama perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banyak ulama dan pedagang dari Timur Tengah dan India yang masuk melalui jalur ini dan turut mempengaruhi struktur sosial-religius masyarakat lokal. Bangunan-bangunan penting seperti Masjid Agung Palembang dan Keraton Kuto Besak dibangun di dekat sungai sebagai simbol pentingnya Sungai Musi dalam pusat kekuasaan dan keagamaan (Azra, 2004; Dahlan, 2020). Bahkan pada masa kolonial Belanda, Sungai Musi tetap memainkan peran sentral dalam kegiatan ekonomi dan militer. Belanda membangun pelabuhan-pelabuhan besar serta pos-pos pengawasan di sepanjang sungai guna memaksimalkan potensi ekspor sumber daya alam dari pedalaman Sumatra ke Eropa. Sungai Musi juga menjadi medan pertempuran penting dalam berbagai perlawanan rakyat terhadap kolonialisme, seperti Perang Palembang tahun 1819 dan 1821 (Lombard, 1996). Dalam konteks ini, Sungai Musi tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi kolonial, tetapi juga menjadi simbol resistensi rakyat terhadap kekuasaan asing.

Warisan budaya yang lahir dari interaksi masyarakat dengan Sungai Musi tampak dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari arsitektur rumah limas, tradisi lisan, seni pertunjukan, hingga ritual keagamaan. Seiring berkembangnya kota dan industrialisasi, fungsi Sungai Musi mulai mengalami pergeseran, namun jejak sejarahnya tetap terjaga dalam berbagai situs budaya dan narasi kolektif masyarakat Palembang (Dahlan, 2020). Di sisi lain, berbagai inisiatif mulai muncul dari masyarakat sipil, akademisi, dan

pemerintah daerah dalam upaya merevitalisasi peran Sungai Musi sebagai ruang budaya. Program revitalisasi tepian sungai, festival Musi Tribootton, dan pengembangan kawasan wisata sejarah seperti Kampung Arab Al-Munawwar dan Kampung Kapitan merupakan bagian dari strategi pelestarian berbasis partisipasi masyarakat (Widiastuti, 2019). Namun, upaya-upaya ini masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan budaya yang berkelanjutan. Diperlukan kajian historis-kultural yang lebih komprehensif untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai warisan budaya Sungai Musi dapat dipertahankan di tengah arus perubahan zaman.

Sungai Musi juga memiliki dimensi budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Palembang. Di luar peran ekonomis dan politik, Sungai Musi juga menyimpan kekayaan budaya yang sangat luas. Rumah-rumah tradisional limas dibangun menghadap sungai sebagai bentuk penghormatan dan pemanfaatan terhadap aliran air. Tradisi lomba perahu bidar, ritual mandi safar, dan berbagai cerita rakyat seperti legenda Putri Kembang Dadar merupakan contoh warisan takbenda yang tumbuh dari interaksi masyarakat dengan sungai (Hasan, 2017). Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya mencerminkan fungsi rekreatif dan religius Sungai Musi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sungai menjadi medium ekspresi budaya dan memori kolektif masyarakat Palembang. Dalam konteks ini, Sungai Musi dapat dikategorikan sebagai *cultural landscape* atau lanskap budaya yang tidak terpisahkan dari identitas kota dan warganya (UNESCO, 2008).

Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, Sungai Musi menghadapi berbagai tekanan akibat perkembangan kota dan modernisasi yang tidak terkontrol. Urbanisasi, pembangunan infrastruktur besar, serta pencemaran limbah rumah tangga dan industri telah menurunkan kualitas air dan fungsi ekologis sungai (Bapedalda Sumsel, 2021). Sejumlah situs sejarah di sepanjang sungai mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sungai sebagai bagian dari warisan budaya juga mulai terkikis, terutama di kalangan generasi muda. Dalam banyak kasus, sungai justru dipandang sebagai 'belakang rumah', tempat membuang limbah, bukan sebagai ruang publik yang harus dijaga dan dirawat.

Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, Sungai Musi menghadapi tantangan serius. Pertumbuhan kota yang pesat, pembangunan infrastruktur, serta industrialisasi menyebabkan degradasi lingkungan dan terpinggirkannya peran budaya sungai. Banyak situs budaya di bantaran sungai yang rusak atau hilang, sementara kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah sungai juga mulai berkurang. Di sisi lain, muncul pula berbagai inisiatif pelestarian berbasis komunitas dan revitalisasi kawasan tepi sungai sebagai bagian dari upaya mempertahankan identitas budaya Kota Palembang (Kompas, 2021; Widiastuti, 2019).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Sungai Musi secara historis membentuk identitas Kota Palembang serta bagaimana keberlanjutan warisan budaya sungai tersebut menghadapi tekanan modernisasi dan degradasi lingkungan. Kajian ini tidak hanya memosisikan Sungai Musi sebagai objek narasi sejarah, tetapi sebagai ruang budaya yang mengalami

ketegangan antara nilai historis yang tinggi dengan perubahan sosial, ekologis, dan kebijakan pembangunan kota kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan analisis kritis terhadap keberlangsungan warisan budaya Sungai Musi dalam konteks perubahan zaman, khususnya ketika peran sungai semakin terpinggirkan dalam orientasi pembangunan perkotaan modern.

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi historis kualitatif yang bertujuan merekonstruksi peristiwa masa lalu melalui tahapan metodologis yang sistematis, meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan terkait Sungai Musi, baik sumber primer maupun sekunder. Tahap kritik sumber mencakup kritik eksternal untuk menilai keaslian sumber dan kritik internal untuk menguji kredibilitas isi sumber. Selanjutnya, tahap interpretasi digunakan untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah secara kontekstual, sebelum disusun dalam bentuk narasi historis pada tahap historiografi (Kuntowijoyo, 2003; Gottschalk, 1986). Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kajian warisan budaya (*heritage studies*) untuk memahami bagaimana warisan budaya Sungai Musi baik yang bersifat tangible maupun *intangible* berfungsi dalam kehidupan masyarakat modern (Ashworth, Graham, & Tunbridge, 2007).

Data sekunder diperoleh dari buku-buku sejarah, artikel jurnal, dokumen pemerintah, dan arsip kolonial. Beberapa sumber utama yang digunakan antara lain adalah Dokumen arsip yang digunakan antara lain arsip pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), termasuk laporan administratif, catatan perdagangan, serta dokumen serah-terima kekuasaan (*Overgave*) dan catatan harian pemerintahan (*Dagregister*). Sumber-sumber ini digunakan untuk menelusuri perubahan fungsi Sungai Musi dalam konteks politik, ekonomi, dan tata ruang pada masa kolonial, serta untuk memperkuat validitas data sejarah yang dianalisis (Ricklefs, 2008; Boomgaard, 2007). Teknik analisis data menggunakan metode interpretatif-historis, dimana penulis menafsirkan data sejarah secara kontekstual untuk menggali makna budaya dan sosial yang terkandung di dalamnya (Kuntowijoyo, 2003).

Sumber primer meliputi catatan Belanda, kronik lokal, prasasti, serta narasi lisan yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku sejarah, dan artikel budaya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis naratif dan kronologis, dengan membandingkan berbagai sumber untuk mengidentifikasi konsistensi dan bias informasi, sehingga diperoleh rekonstruksi sejarah Sungai Musi yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Storey, 2011; Vansina, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sungai Musi pada Masa Kerajaan Sriwijaya

Sungai Musi merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Sumatra, mengalir sepanjang lebih dari 750 kilometer dan membelah Provinsi Sumatra Selatan.

Keberadaannya telah lama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Palembang, baik sebagai jalur transportasi, pusat perdagangan, maupun sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Namun, lebih dari itu, Sungai Musi memiliki nilai historis yang sangat signifikan karena menjadi nadi utama Kerajaan Sriwijaya yang pernah berjaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Sungai ini tidak hanya menopang kehidupan ekonomi dan sosial, tetapi juga berperan dalam menyatukan wilayah kekuasaan Sriwijaya yang tersebar di sepanjang pesisir barat dan timur Sumatra, bahkan hingga ke kawasan Asia Tenggara lainnya (Manguin, 1993, hlm. 41).

Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan internasional antara India dan Cina. Letak geografis Palembang yang berada di delta Sungai Musi menjadikannya strategis sebagai pelabuhan transit dan pusat perdagangan. Akses dari laut menuju daratan melalui Sungai Musi memungkinkan kapal-kapal dagang besar masuk jauh ke pedalaman, sehingga memperluas jaringan perdagangan Sriwijaya dan memperkokoh hegemoni ekonominya di kawasan Asia Tenggara (Wolters, 1982, hlm. 57). Dengan kemampuan ini, Sriwijaya tidak hanya menjadi pelabuhan dagang, tetapi juga pusat penyebaran agama Buddha dan kebudayaan Melayu.

Peranan Sungai Musi sebagai sarana mobilitas militer dan administrasi pun tidak kalah penting. Dalam sistem pemerintahan Sriwijaya yang bercorak mandala, kontrol terhadap jalur-jalur sungai merupakan bagian vital dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Sungai Musi tidak hanya menghubungkan pusat kerajaan dengan wilayah taklukan di sekitarnya, tetapi juga memungkinkan ekspedisi militer dan distribusi barang logistik dilakukan dengan efisien. Hal ini didukung oleh penemuan arkeologis berupa situs-situs pemukiman kuno, struktur pelabuhan, dan prasasti-prasasti seperti Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Musi, menunjukkan bagaimana sungai tersebut menjadi pusat aktivitas politik dan administratif kerajaan (Munoz, 2006, hlm. 85).

Selain itu, Paul Wheatley dalam kajiannya menunjukkan bahwa sungai-sungai besar seperti Musi tidak hanya digunakan untuk transportasi, tetapi juga menjadi media pengendalian distribusi barang perdagangan seperti kapur barus, emas, gading, dan hasil hutan lainnya yang merupakan komoditas unggulan Sriwijaya. Dengan demikian, penguasaan atas Sungai Musi secara langsung mempengaruhi kemampuan Sriwijaya dalam mengatur arus barang dan jasa, serta dalam memungut pajak dari aktivitas perdagangan tersebut (Wheatley, 1983, hlm. 210).

Selain sebagai pusat ekonomi dan politik, Sungai Musi juga memainkan peran penting dalam aspek religius dan kebudayaan Sriwijaya. Sungai dalam kosmologi masyarakat Nusantara kuno seringkali dimaknai sebagai simbol kesucian dan transendensi. Sungai Musi menjadi lokasi ritual, pendaratan utusan luar negeri, hingga tempat berdirinya biara-biara Buddha yang menjadi pusat studi dan meditasi bagi para biksu dari berbagai penjuru Asia. Sejumlah catatan perjalanan dari biksu Tiongkok, seperti I-Tsing, menyebutkan kemegahan pusat pembelajaran Buddha di Sriwijaya yang berlokasi tidak jauh dari aliran sungai besar, yang menunjukkan pentingnya Sungai Musi dalam kehidupan spiritual dan intelektual kerajaan. Namun, catatan I-Tsing perlu dibaca

secara kritis karena ditulis dari perspektif seorang peziarah dan pelajar agama Buddha, sehingga lebih menekankan aspek religius dan institusional dibandingkan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesaksiannya dipahami sebagai representasi normatif dunia keagamaan Sriwijaya yang perlu dikontekstualisasikan dengan sumber sejarah lain (I-Tsing, 2005 [edisi terjemahan], hlm. 29–31).

Peran Sungai Musi juga sangat dominan dalam konteks kekuasaan politik dan pertahanan Sriwijaya. Sungai ini memungkinkan kerajaan untuk mengawasi dan mengontrol wilayah-wilayah kekuasaan di sekitarnya, serta menjadi jalur strategis bagi pergerakan pasukan militer. Dalam sistem mandala yang diterapkan Sriwijaya, kendali atas jalur air menjadi kunci untuk mempertahankan otoritas atas daerah-daerah vasal. Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Musi mencatat perjalanan suci (siddhayatra) seorang pemimpin Sriwijaya menggunakan perahu dan pasukan untuk menaklukkan wilayah baru, yang mengindikasikan penggunaan Sungai Musi dalam ekspansi kekuasaan (Coedès, 1968, hlm. 104–105).

Lebih lanjut, temuan situs arkeologi di sepanjang Sungai Musi, seperti di Bukit Seguntang, Karanganyar, dan Sabokingking, menunjukkan keberadaan struktur yang kemungkinan besar merupakan pelabuhan militer atau benteng pertahanan. Hal ini memperkuat asumsi bahwa sungai tersebut tidak hanya berfungsi secara ekonomis tetapi juga sebagai jalur logistik dan pertahanan yang vital (Manguin, 1993, hlm. 41–43).

Sungai Musi juga menjadi saluran penting dalam penyebaran agama Buddha Mahayana dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Arus lalu lintas pelajar dan biksu dari India, Sri Lanka, dan Cina memanfaatkan sungai ini sebagai pintu masuk menuju pusat studi keagamaan di Sriwijaya. Berdasarkan laporan I-Tsing, Sriwijaya memiliki lebih dari 1.000 pelajar Buddha dan merupakan pusat pembelajaran yang terkenal sebelum melanjutkan studi ke Nalanda di India. Keberadaan biara dan situs meditasi di sepanjang Sungai Musi menjadi bukti bagaimana sungai ini menjadi elemen penting dalam kehidupan spiritual kerajaan (I-Tsing, 2005, hlm. 32).

Penemuan arkeologis berupa arca Buddha dan prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta di wilayah tepi Sungai Musi juga menjadi indikasi bahwa kawasan ini menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Melayu-Buddha. Para ahli seperti De Casparis menegaskan bahwa perkembangan aksara, seni rupa, serta sistem keagamaan di Sriwijaya banyak dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi melalui jalur air ini (De Casparis, 1975, hlm. 17–18).

Tidak hanya berdampak pada perdagangan internasional, Sungai Musi juga memainkan peran dalam mengintegrasikan aktivitas ekonomi lokal di wilayah hulu dan hilir. Pedagang dari pedalaman dapat mengangkut hasil bumi seperti rotan, damar, dan hasil pertanian ke pusat perdagangan di Palembang, yang kemudian diteruskan ke jaringan pelabuhan Sriwijaya di luar Sumatra. Hal ini menciptakan struktur ekonomi yang terintegrasi secara vertikal, dari tingkat lokal ke tingkat regional dan internasional (Hall, 1985, hlm. 118).

Sungai Musi juga memainkan peran dalam hubungan diplomatik Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia. Keberadaan pelabuhan alami di muara sungai ini memungkinkan kerajaan menerima utusan dan pedagang asing dengan lebih mudah.

Sejumlah bukti dari sumber Tiongkok, seperti *Zhu Fan Zhi* dan catatan Dinasti Tang, menyebutkan bahwa Sriwijaya rutin mengirim dan menerima utusan ke istana kekaisaran Cina, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dagang dan memperoleh pengakuan politik (Wolters, 1967, hlm. 17–18).

Diplomasi ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang disediakan oleh Sungai Musi sebagai pintu masuk utama ke wilayah inti kerajaan. Utusan asing yang datang melalui laut dapat langsung mengakses pusat kekuasaan dengan melewati sungai tersebut, sehingga menjadikan Sriwijaya mudah diakses tanpa perlu menempuh medan darat yang sulit. Posisi sungai ini menjadikannya bukan hanya jalur perdagangan dan militer, tetapi juga simbol keterbukaan dan kemampuan adaptasi Sriwijaya dalam tatanan geopolitik Asia Tenggara abad pertengahan (Munoz, 2006, hlm. 91).

Diplomasi ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang disediakan oleh Sungai Musi sebagai pintu masuk utama ke wilayah inti kerajaan. Utusan asing yang datang melalui laut dapat langsung mengakses pusat kekuasaan dengan melewati sungai tersebut, sehingga menjadikan Sriwijaya mudah diakses tanpa perlu menempuh medan darat yang sulit. Posisi sungai ini menjadikannya bukan hanya jalur perdagangan dan militer, tetapi juga simbol keterbukaan dan kemampuan adaptasi Sriwijaya dalam tatanan geopolitik Asia Tenggara abad pertengahan (Munoz, 2006, hlm. 91).

Meskipun Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-13 akibat serangan dari Kerajaan Chola dan kebangkitan kekuatan politik lain seperti Majapahit, fungsi Sungai Musi tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Palembang. Sejumlah kajian sejarah menunjukkan bahwa setelah melemahnya kekuasaan Sriwijaya, kawasan di sekitar Sungai Musi masih berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan kebudayaan, ditandai dengan keberlanjutan jalur perdagangan sungai, pemukiman penduduk, serta aktivitas distribusi komoditas dari wilayah pedalaman ke hilir (Andaya, 2008; Reid, 2011). Bukti arkeologis dan historis berupa temuan permukiman berkelanjutan serta catatan perdagangan regional memperlihatkan bahwa intensitas pemanfaatan Sungai Musi tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan kekuasaan kerajaan, melainkan didukung oleh kondisi geografis dan ekologisnya yang strategis sebagai jalur transportasi alami (Hall, 1985; Manguin, 1993).

Dalam masa-masa selanjutnya, seperti pada masa Kesultanan Palembang Darussalam (abad ke-17–19), Sungai Musi masih digunakan sebagai jalur distribusi lada dan karet, serta sebagai penghubung antara pedalaman dengan pasar dunia. Fakta ini menunjukkan kesinambungan peran strategis Sungai Musi selama berabad-abad, meskipun entitas politik yang menguasainya berubah-ubah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Sungai Musi merupakan salah satu faktor geografis yang secara konsisten menopang struktur sosial, ekonomi, dan budaya wilayah ini (Reid, 2011, hlm. 120–121).

Penelitian arkeologis modern yang dilakukan di sepanjang Sungai Musi telah memberikan bukti yang memperkuat posisi sungai ini sebagai pusat kehidupan Sriwijaya. Temuan seperti struktur dermaga kuno, artefak keramik Tiongkok, pecahan prasasti, hingga sisa-sisa permukiman menunjukkan bahwa daerah aliran Sungai Musi adalah kawasan urban yang kompleks pada masanya. Penemuan di situs Karanganyar

dan Sabokingking, misalnya, menjadi indikasi kuat bahwa sungai ini tidak hanya sebagai media transportasi, tetapi juga sebagai sumbu urbanisasi dan peradaban (Suryanegara, 2013, hlm. 55–56).

Arkeolog Pierre-Yves Manguin dalam studi lapangannya menyebutkan bahwa konsentrasi situs kuno di tepi Sungai Musi mencerminkan adanya perencanaan tata ruang kota yang menyatu dengan fungsi sungai. Ini memperkuat anggapan bahwa Sriwijaya adalah sebuah kota sungai (*riverine city*) yang kompleks, yang infrastrukturnya sangat bergantung pada akses air. Oleh karena itu, pendekatan arkeo-geografis sangat penting dalam mengungkap sejarah Sriwijaya secara utuh, dan Sungai Musi harus menjadi titik awal analisis (Manguin, 2012, hlm. 71–73).

Penelitian Miksic (2017) juga menambahkan bahwa Sungai Musi mendukung terbentuknya pasar-pasar lokal yang berkembang secara organik, dan memungkinkan terciptanya kelas pedagang serta birokrasi lokal yang berfungsi sebagai perantara antara pusat kekuasaan dan masyarakat adat. Dengan kata lain, sungai ini memperkuat basis ekonomi Sriwijaya dari bawah (Miksic, 2017, hlm. 76).

Dengan demikian, kajian tentang peran Sungai Musi pada masa Kerajaan Sriwijaya menegaskan bahwa sungai ini berfungsi sebagai faktor geografis utama yang membentuk dinamika kekuasaan, jaringan dagang, serta struktur sosial-budaya kawasan Sumatra Selatan dan Asia Tenggara. Dalam konteks sejarah maritim Indonesia, Sungai Musi menempati posisi sentral sebagai contoh bagaimana sungai besar menjadi fondasi geografis bagi kemunculan dan kejayaan suatu peradaban besar (Hall, 1985, hlm. 112).

Sungai Musi dalam Masa Kesultanan Palembang

Sungai Musi merupakan urat nadi kehidupan yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah kota Palembang sejak zaman prasejarah hingga masa Kesultanan Palembang Darussalam. Keberadaan sungai ini tidak hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai jalur komunikasi, perdagangan, dan pertahanan strategis. Dalam masa Kesultanan Palembang (abad ke-17 hingga awal abad ke-19), Sungai Musi menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi yang membentuk karakter kota Palembang sebagai pusat peradaban di wilayah Sumatra bagian selatan. Sungai ini menghubungkan Palembang dengan berbagai wilayah di pedalaman Sumatra dan dunia luar, terutama melalui aktivitas maritim yang intensif (Hanafiah, 2010, hlm. 25).

Seiring berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam pada awal abad ke-17, wilayah di sekitar Sungai Musi menjadi pusat administrasi kerajaan, termasuk pembangunan keraton, masjid, dan pelabuhan. Sultan Mahmud Badaruddin I, yang memerintah pada 1724–1758, memanfaatkan posisi strategis sungai ini untuk mengembangkan Palembang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, timah, dan komoditas lainnya yang diminati bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris. Aktivitas perdagangan yang berlangsung di sepanjang sungai ini menjadikan Palembang sebagai salah satu kota pelabuhan terpenting di kawasan Nusantara pada masanya (Andaya, 1975, hlm. 143).

Sungai Musi selama masa Kesultanan Palembang Darussalam memiliki fungsi multifungsi yang sangat vital, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama-tama, dari sisi politik dan pertahanan, sungai ini menjadi jalur utama mobilitas militer kesultanan. Kesultanan Palembang membangun benteng-benteng di sepanjang Sungai Musi seperti Benteng Kuto Besak yang selesai dibangun pada tahun 1797. Letaknya yang strategis di tepi sungai memungkinkan pengawasan lalu lintas kapal dan pertahanan terhadap serangan asing, khususnya dari kolonial Belanda. Sungai juga digunakan sebagai jalur pelarian atau mobilisasi pasukan ketika terjadi konflik atau serangan militer (Lubis, 2003, hlm. 112).

Dari aspek ekonomi, Sungai Musi merupakan jalur utama distribusi barang dagangan dari wilayah pedalaman Sumatra ke Palembang dan sebaliknya. Sungai ini memungkinkan masuknya komoditas seperti lada, damar, rotan, dan timah dari daerah hulu seperti Musi Rawas, Lahat, dan Jambi ke pusat kota. Di sisi lain, komoditas tersebut kemudian diekspor melalui pelabuhan sungai ke wilayah lain di Nusantara dan mancanegara seperti India, Tiongkok, dan Eropa. Dalam catatan Belanda abad ke-18, Palembang dikenal sebagai penghasil timah dan lada yang penting. Seluruh proses perdagangan ini terintegrasi melalui sistem pelayaran sungai, yang juga mendukung keberlangsungan ekonomi kerajaan (Andaya, 1975, hlm. 149–150).

Selain fungsi ekonomi, Sungai Musi juga memiliki nilai simbolis dan religius bagi Kesultanan Palembang. Banyak kegiatan keagamaan dan adat dilakukan di tepian sungai ini. Misalnya, tradisi arak-arakan perahu dalam upacara keagamaan Islam atau prosesi kerajaan yang dilakukan melalui sungai. Hal ini mencerminkan bagaimana sungai tersebut dijadikan bagian dari identitas budaya dan spiritual masyarakat Palembang. Bahkan dalam beberapa sumber lokal, Sungai Musi disebut sebagai anugerah ilahi yang menghidupi rakyat dan menjaga kesinambungan kekuasaan kesultanan (Lubis, 2003, hlm. 67).

Namun demikian, dominasi Kesultanan Palembang atas Sungai Musi tidak berlangsung tanpa tantangan. Kedatangan kekuatan kolonial seperti VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) menimbulkan konflik kepentingan terhadap akses dan kontrol atas sungai. Sungai Musi menjadi arena perebutan kekuasaan antara lokal dan kolonial. Beberapa insiden seperti serangan Belanda ke Palembang pada tahun 1811 dan 1821 menunjukkan betapa pentingnya kontrol atas sungai ini dalam konteks pertahanan dan geopolitik (Ricklefs, 2008, hlm. 188).

Secara historis, Sungai Musi merupakan elemen penting dalam dinamika kekuasaan, ekonomi, dan budaya Kesultanan Palembang. Oleh karena itu, menelusuri peran Sungai Musi selama masa kesultanan bukan hanya mengungkap sejarah lokal, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara lingkungan alam dan pembentukan kekuasaan di masa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Sungai Musi berperan sebagai pusat kehidupan Kesultanan Palembang dan bagaimana perubahan sosial-politik pada masa tersebut dipengaruhi oleh keberadaan sungai ini (Abdullah, 2012, hlm. 211).

Selain itu, Sungai Musi juga memainkan peran sosial dan budaya yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Palembang. Aktivitas sehari-hari banyak

dilakukan di sekitar sungai: mencuci, mandi, memasak, dan berdagang. Bahkan sistem pemukiman masyarakat Palembang kuno terbentuk mengikuti pola bantaran sungai dengan rumah-rumah panggung di atas rakit atau tepian air. Arsitektur khas rumah limas dan rumah rakit adalah representasi langsung dari adaptasi masyarakat terhadap lingkungan sungai. Sungai bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga menjadi ruang sosial di mana komunitas berinteraksi dan membentuk identitas lokal mereka (Hanafiah, 2010, hlm. 55–56).

Dalam praktik keagamaan dan ritual, Sungai Musi juga dijadikan lokasi penting dalam prosesi adat dan keislaman. Upacara pelantikan sultan atau kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi dan hari raya besar sering kali diwarnai oleh iring-iringan perahu dan hiasan sungai. Masjid-masjid penting seperti Masjid Agung Palembang sengaja dibangun tidak jauh dari Sungai Musi untuk memudahkan akses jamaah dan pemuka agama. Hubungan antara kesultanan dan Islam juga diperkuat melalui pendekatan simbolik terhadap sungai, di mana Musi dianggap sebagai pemberi berkah dan kesuburan bagi tanah kerajaan (Abdullah, 2012, hlm. 216).

Namun demikian, kendali Kesultanan Palembang atas Sungai Musi mendapat tantangan dari pihak eksternal, khususnya Belanda. VOC dan kemudian pemerintahan kolonial Hindia Belanda melihat Sungai Musi sebagai aset penting yang harus dikuasai demi kepentingan dagang dan politik. Serangan Belanda pada tahun 1811 dan 1821 ke Palembang terutama ditujukan untuk menguasai akses Sungai Musi dan pelabuhan-pelabuhannya. Kekalahan kesultanan dalam konflik ini menandai berakhirnya kedaulatan atas sungai dan penurunan peran Musi sebagai jalur perdagangan kerajaan. Sejak saat itu, kontrol atas Sungai Musi beralih ke tangan kolonial dan digunakan sebagai sarana ekspansi ekonomi kolonial ke pedalaman (Ricklefs, 2008, hlm. 189).

Pada akhirnya, Sungai Musi dapat dipahami sebagai simbol kekuasaan, kesejahteraan, dan keutuhan budaya Kesultanan Palembang. Hal ini tercermin dari posisi sungai sebagai pusat aktivitas politik dan ekonomi kerajaan, sebagaimana tercatat dalam kronik Kesultanan Palembang dan arsip kolonial yang menunjukkan penguasaan sungai sebagai basis kontrol perdagangan komoditas strategis seperti lada dan timah dari wilayah pedalaman ke pasar internasional (Andaya, 1975; Ricklefs, 2008). Catatan pelaut dan pedagang Arab–India juga menggambarkan Palembang sebagai bandar sungai yang aktif dan makmur, dengan Sungai Musi berfungsi sebagai jalur utama distribusi dan interaksi budaya (Reid, 1993). Dengan demikian, sungai tidak hanya berperan sebagai sarana logistik atau perdagangan, tetapi menjadi fondasi utama sistem sosial-politik dan identitas budaya Kesultanan Palembang, sehingga penurunan fungsinya setelah intervensi kolonial menandai hilangnya kedaulatan dan integrasi ruang kekuasaan kerajaan (Kurniawan, 2019, hlm. 88–89).

Masa Kolonial dan Perubahan Fungsi Sungai

Pada masa sebelum kolonialisme, sungai memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat di kepulauan Nusantara, termasuk di Palembang. Sungai tidak hanya menjadi jalur transportasi utama, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal. Dalam konteks Palembang, Sungai Musi menjadi urat nadi kota,

menghubungkan wilayah hulu dan hilir, serta memfasilitasi pertukaran barang, manusia, dan ide. Masyarakat lokal mengembangkan sistem permukiman dan perdagangan yang sangat bergantung pada keberadaan dan fungsi sungai sebagai sarana mobilitas dan komunikasi utama (Tauchid, 1981, hlm. 44).

Namun, ketika kekuasaan kolonial Belanda mulai menguasai wilayah-wilayah di Nusantara, termasuk Palembang pada abad ke-17 hingga ke-19, terjadi pergeseran signifikan terhadap fungsi sungai (Abeyasekere, 1987; Ricklefs, 2008). Pemerintah kolonial memandang sungai tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai aset ekonomi dan militer strategis. Sungai Musi, misalnya, digunakan untuk memfasilitasi ekspor hasil bumi seperti karet, kopi, dan rempah-rempah yang dikumpulkan dari pedalaman Sumatera. Dalam upaya mengintegrasikan wilayah jajahan ke dalam sistem ekonomi kolonial, Belanda membangun berbagai infrastruktur pelabuhan dan pos perdagangan di sepanjang sungai (Elson, 2008, hlm. 112).

Selain sebagai jalur transportasi komoditas ekspor, Sungai Musi juga dijadikan sebagai alat kontrol keamanan oleh pemerintah kolonial. Belanda menyadari bahwa penguasaan atas jalur air penting untuk meredam potensi perlawanan lokal dan menjaga stabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, berbagai pos militer dan menara pengawas didirikan di titik-titik strategis di sepanjang sungai. Dalam laporan kolonial abad ke-19, disebutkan bahwa patroli bersenjata secara rutin dilakukan di Sungai Musi untuk mengawasi aktivitas penduduk dan mencegah penyelundupan atau gerakan pemberontakan (Ricklefs, 2001, hlm. 182–183). Hal ini menjadikan sungai tidak hanya sebagai saluran ekonomi, tetapi juga sebagai ruang pengawasan politik.

Pengaruh kolonial terhadap fungsi sungai juga terlihat dari transformasi arsitektur kota yang berorientasi darat. Kota Palembang sebelum kolonial lebih berorientasi pada aliran air, dengan rumah-rumah panggung dan permukiman terapung yang dibangun sejajar dengan arus sungai. Namun, masuknya tata kota kolonial yang mengikuti model kota-kota Eropa menyebabkan bergesernya orientasi ini ke arah daratan. Jalan-jalan utama dibangun membentang dari pusat kekuasaan kolonial menuju pedalaman, memotong jalur sungai sebagai penghubung utama. Perubahan ini secara perlahan menggeser peran sungai dari pusat aktivitas ke posisi periferal dalam kehidupan urban (Nas, 2002, hlm. 97–98).

Dari sudut pandang ekonomi, sistem kolonial menyebabkan terjadinya integrasi paksa antara ekonomi lokal dan ekonomi global melalui eksploitasi sungai sebagai sarana penghubung. Komoditas lokal seperti damar, rotan, dan hasil perkebunan tidak lagi dijual di pasar lokal, tetapi dikumpulkan dan dikirim melalui sungai ke Batavia atau langsung ke pelabuhan internasional untuk ekspor. Sistem ini menciptakan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kebijakan kolonial dan menyebabkan hilangnya kemandirian ekonomi masyarakat sungai yang sebelumnya menjalankan sistem perdagangan berbasis komunitas (Elson, 2008, hlm. 140–141).

Secara sosial, fungsi sungai sebagai ruang pertemuan dan interaksi antarwarga mulai tereduksi. Di masa pra-kolonial, sungai merupakan arena publik tempat masyarakat berkumpul, berdagang, hingga melangsungkan kegiatan budaya dan keagamaan. Namun, dengan diberlakukannya peraturan kolonial terkait keamanan,

sanitasi, dan pembatasan pergerakan, masyarakat mulai dijauhkan dari sungai. Banyak ruang-ruang publik seperti pasar apung, dermaga komunitas, dan ruang ibadah yang sebelumnya berada di tepi sungai dipindahkan atau dibatasi. Hal ini menghilangkan peran sungai sebagai ruang sosial yang inklusif (Reid, 1993, hlm. 56–57).

Lebih lanjut, dalam konteks pendidikan dan kebijakan budaya, kolonialisme tidak mendorong pelestarian tradisi sungai. Pendidikan formal pada masa Belanda lebih berfokus pada pelatihan administratif dan keterampilan industri, bukan pada pelestarian pengetahuan lokal seperti navigasi sungai, sistem irigasi tradisional, atau budaya rakit. Akibatnya, generasi muda di masa kolonial mulai menjauh dari sungai sebagai ruang identitas budaya dan lebih tertarik pada kehidupan darat yang diasosiasikan dengan modernitas kolonial (Kahin, 2003, hlm. 112–113). Ini menandai perubahan nilai terhadap sungai sebagai warisan budaya yang mulai ditinggalkan.

Akhirnya, salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah bahwa perubahan fungsi sungai pada masa kolonial bukanlah proses alami, melainkan hasil dari kebijakan sistematis yang didorong oleh kekuasaan politik dan ekonomi kolonial. Sungai yang dahulu menjadi simbol keberlanjutan lokal dan kemerdekaan komunitas, berubah menjadi instrumen kontrol, eksploitasi, dan marginalisasi. Pemahaman ini penting untuk merekonstruksi kembali peran sungai dalam masyarakat kontemporer, baik sebagai ruang ekologis, sosial, maupun budaya yang harus dipulihkan dari warisan kolonialisme (Peluso & Watts, 2001, hlm. 28–29).

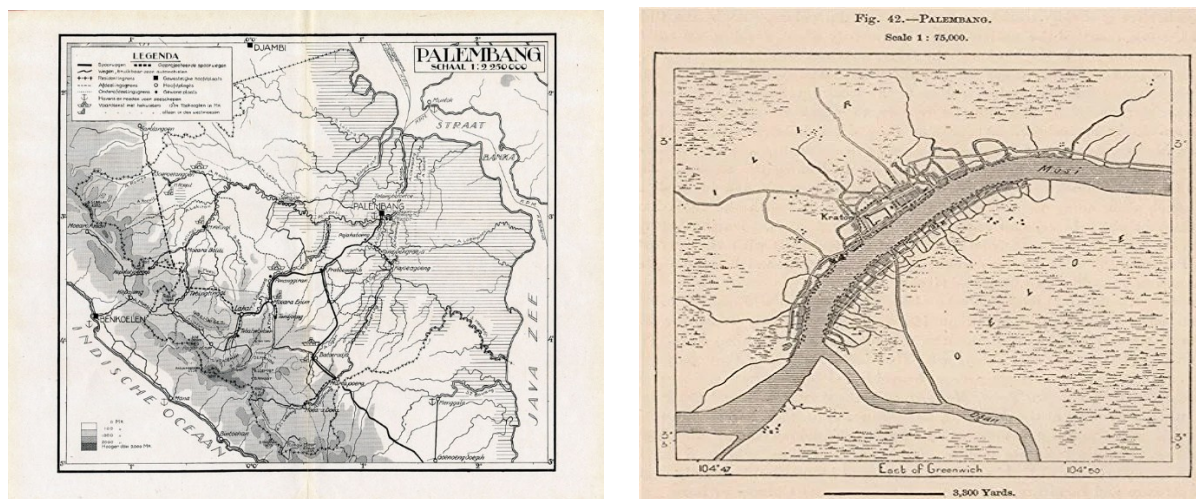
Lebih jauh lagi, kebijakan kolonial menyebabkan terjadinya restrukturisasi ruang kota dan orientasi sosial masyarakat terhadap sungai. Jika sebelumnya sungai adalah pusat kehidupan masyarakat, pada masa kolonial terjadi pemisahan antara fungsi ekonomi dan sosial. Sungai mulai dijadikan batas antara kawasan elite kolonial dan permukiman pribumi. Di Palembang, misalnya, kawasan Ilir dikembangkan menjadi pusat administrasi dan perdagangan kolonial, sedangkan kawasan Ulu tetap menjadi tempat bermukimnya masyarakat lokal. Hal ini mencerminkan bagaimana fungsi sungai berubah dari ruang inklusif menjadi ruang eksklusif dengan pembagian sosial yang tajam (Abeyasekere, 1987, hlm. 73–75).

Tidak hanya itu, kolonialisme juga mengubah pola pemanfaatan sungai melalui pengenalan teknologi dan kebijakan baru. Pembangunan tanggul, pengaturan irigasi, dan kanal-kanal buatan di beberapa daerah membuat sungai menjadi lebih terkendali oleh kepentingan negara kolonial, bukan masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan sebagian besar otonomi mereka dalam mengelola dan memanfaatkan sungai. Selain itu, pencemaran dan degradasi lingkungan mulai muncul akibat eksploitasi berlebihan sumber daya air oleh pemerintah kolonial dan perusahaan swasta (Boomgaard, 2007, hlm. 58–60).

Dengan demikian, masa kolonial menandai fase penting dalam perubahan fungsi sungai, dari sarana hidup masyarakat lokal menjadi alat eksploitasi dan dominasi kolonial. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada struktur sosial dan tata ruang kota. Studi historis tentang perubahan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana warisan kolonial masih memengaruhi hubungan masyarakat dengan sungai hingga saat ini.

Hasil kajian historis menunjukkan bahwa pada masa kolonial Belanda, fungsi Sungai Musi di Palembang mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun tata ruang. Sungai yang awalnya menjadi pusat aktivitas masyarakat lokal mulai dari perdagangan tradisional, transportasi air, hingga kegiatan sosial budaya perlahan-lahan bergeser menjadi infrastruktur pendukung sistem kapitalisme kolonial. Belanda menyadari potensi Sungai Musi sebagai jalur utama distribusi komoditas ekspor dari pedalaman ke pelabuhan utama, sehingga membangun pelabuhan dan pos pengawasan di beberapa titik strategis seperti Boom Baru dan 10 Ulu (Abeyasekere, 1987, hlm. 102–104).

Kolonialisme juga membawa intervensi fisik terhadap tubuh sungai dan ruang sekitarnya. Pemerintah kolonial membangun dermaga, pos militer, gudang-gudang perdagangan, dan benteng di sepanjang Sungai Musi untuk mengontrol lalu lintas barang dan manusia. Salah satu infrastruktur penting yang dibangun adalah Benteng Kuto Besak yang menghadap langsung ke sungai dan berfungsi sebagai pusat administrasi dan militer. Dengan demikian, sungai bukan lagi milik publik masyarakat lokal, melainkan menjadi ruang yang dikontrol oleh kekuasaan kolonial untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka (Gallop, 2019, hlm. 41–42).



Gambar 1. Peta Palembang dan sekitarnya Abad ke-19
(sumber: Universiteitsbibliotheek Leiden, KITLV Maps Collection)

Hasil dokumentasi peta kolonial menunjukkan perubahan orientasi ruang kota Palembang dari yang berorientasi sungai menjadi kota dengan struktur tersegmentasi. Sungai mulai menjadi batas sosial antara kawasan elit dan kawasan masyarakat lokal. Wilayah Ilir dikembangkan sebagai pusat kekuasaan kolonial dengan arsitektur Eropa dan jalur jalan darat yang lebih tertata, sementara kawasan Ulu cenderung dibiarkan berkembang secara alami sebagai pemukiman masyarakat adat dan buruh (Creese, 2004, hlm. 88). Ini memperlihatkan adanya pemisahan kelas yang diperkuat oleh pengelolaan ruang berbasis sungai.

Perubahan ini juga berdampak pada budaya sungai masyarakat Palembang. Aktivitas perahu, pasar apung, dan rumah-rumah rakit yang sebelumnya mendominasi

lanskap sungai perlahan tergeser oleh dominasi kapal dagang besar dan sistem pelabuhan kolonial. Tradisi lokal seperti pasar terapung dan pemukiman rakit kehilangan peran sentralnya dalam sistem ekonomi karena tidak lagi terintegrasi dalam jaringan perdagangan kolonial yang lebih besar. Hal ini menyebabkan terjadinya marginalisasi budaya sungai dan berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap sungai sebagai ruang hidup utama (Boomgaard, 2007, hlm. 62–64).

Selanjutnya, perubahan fungsi sungai juga disebabkan oleh kebijakan agraria dan eksploitasi sumber daya alam yang didorong oleh kolonialisme. Sungai-sungai dijadikan jalur utama pengangkutan hasil perkebunan kolonial seperti kopi, karet, dan minyak sawit dari daerah pedalaman ke pelabuhan ekspor. Ini membuat sungai berfungsi sebagai sarana logistik industri kolonial. Dalam proses ini, sering kali masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah dan air karena semua dikontrol oleh pemerintah kolonial dan perusahaan perkebunan (Tauchid, 1981, hlm. 59–60).

Dari segi lingkungan, eksploitasi berlebihan dan pembangunan infrastruktur di sepanjang sungai menyebabkan degradasi ekologis. Hutan di sepanjang aliran sungai dibabat untuk perkebunan dan pembangunan jalan logistik, menyebabkan erosi dan pendangkalan sungai. Selain itu, limbah dari industri kolonial mulai mencemari aliran sungai, mengganggu ekosistem air dan kehidupan masyarakat sekitar yang bergantung pada air sungai untuk mandi, mencuci, dan konsumsi sehari-hari (Peluso & Vandergeest, 2001, hlm. 44–45). Dampak lingkungan ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya memengaruhi struktur sosial dan ekonomi, tetapi juga merusak kesinambungan ekologis sungai.

Era Modern: Krisis dan Revitalisasi Budaya Sungai

Pada era modern, Sungai Musi mengalami pergeseran peran yang sangat signifikan dari pusat kehidupan masyarakat menjadi kawasan yang terpinggirkan akibat modernisasi kota dan perubahan orientasi pembangunan. Jika pada masa pra-kolonial dan kolonial sungai menjadi urat nadi ekonomi, sosial, dan budaya, maka sejak pertengahan abad ke-20 fungsi ini mulai mengalami penurunan. Pembangunan jalan raya, pertumbuhan kawasan permukiman darat, serta ekspansi infrastruktur kota yang berorientasi daratan membuat sungai tidak lagi menjadi pusat aktivitas masyarakat. Hal ini berdampak langsung terhadap budaya sungai yang dulunya hidup, kini mulai memudar (Rohendi, 2017, hlm. 43).

Seiring dengan melemahnya fungsi transportasi air dan perdagangan sungai, terjadi pula degradasi lingkungan yang cukup serius. Polusi air dari limbah rumah tangga, industri, dan aktivitas domestik lainnya membuat kualitas air Sungai Musi menurun drastis. Aktivitas tradisional seperti mencuci, mandi, atau sekadar berinteraksi sosial di tepi sungai mulai ditinggalkan karena kondisi sungai yang kotor dan tidak aman. Di samping itu, ekspansi bangunan liar di bantaran sungai juga menyebabkan penyempitan alur sungai dan menurunnya estetika kawasan, memperparah citra buruk sungai di mata masyarakat modern (Sulastri & Hasan, 2020, hlm. 58).

Tak hanya lingkungan fisik, krisis budaya sungai juga mencakup hilangnya nilai-nilai historis dan simbolik Sungai Musi dalam kehidupan masyarakat Palembang. Budaya

sungai yang dahulu erat dengan ritual adat, kegiatan ekonomi tradisional seperti pasar apung, dan bentuk hunian rumah rakit, kini semakin jarang dijumpai. Generasi muda Palembang sebagian besar tidak lagi memiliki kedekatan emosional dan pengetahuan kultural terhadap sungai, karena pendidikan dan media masa kini lebih banyak menonjolkan nilai-nilai modern dan urban dibandingkan nilai lokal (Susanto, 2018, hlm. 91).

Namun demikian, pada dua dekade terakhir, mulai muncul kesadaran akan pentingnya merevitalisasi Sungai Musi sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya kota Palembang. Pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas budaya mulai menggagas berbagai program pelestarian dan pemulihan fungsi budaya sungai, antara lain dengan mengadakan Festival Sungai Musi, lomba perahu bidar, dan restorasi rumah rakit sebagai ikon budaya. Langkah-langkah ini berupaya membangkitkan kembali memori kolektif masyarakat tentang pentingnya sungai dalam sejarah dan jati diri Palembang (Wijaya, 2021, hlm. 77).

Program revitalisasi ini juga didorong oleh konsep pembangunan berkelanjutan dan pariwisata budaya yang mengedepankan pelestarian ekosistem dan warisan lokal. Salah satu contohnya adalah proyek Waterfront City yang mengintegrasikan kawasan tepian sungai dengan ruang publik yang edukatif dan rekreatif. Melalui pendekatan ini, sungai tidak hanya dipandang sebagai sumber daya fisik tetapi juga sebagai aset budaya dan ekonomi yang bisa memberdayakan masyarakat lokal melalui pariwisata berbasis budaya (Fitriani & Mahmud, 2022, hlm. 102).

Meskipun demikian, upaya revitalisasi ini masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan dana, dan resistensi masyarakat terhadap relokasi dari kawasan kumuh di tepian sungai. Selain itu, belum adanya kebijakan yang secara komprehensif mengatur pelestarian budaya sungai dalam tata ruang kota membuat banyak program revitalisasi berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan jangka panjang revitalisasi budaya Sungai Musi (Hendrawan, 2020, hlm. 64).

Dari sisi sosial, modernisasi yang tidak terintegrasi dengan kearifan lokal menyebabkan terjadinya alienasi masyarakat terhadap sungai. Dalam studi etnografi oleh Marzuki (2019), ditemukan bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Musi tidak lagi memaknai sungai sebagai ruang hidup, melainkan sebagai ruang marginal tempat bermukim karena keterbatasan ekonomi. Sebagian besar penghuni kawasan tersebut berasal dari kelas sosial menengah ke bawah, yang tidak memiliki akses terhadap permukiman formal. Ini menandakan terjadinya pergeseran relasi sosial, di mana sungai yang dulunya menjadi titik temu komunitas kini menjadi simbol keterpinggiran (Marzuki, 2019, hlm. 121).

Selain itu, budaya sungai di Palembang juga tergeser oleh masuknya budaya populer dan konsumtif yang tidak berpijak pada identitas lokal. Aktivitas budaya yang sebelumnya berbasis air, seperti lomba bidar tradisional, permainan anak-anak di sungai, serta arisan rumah rakit, mulai tergantikan oleh hiburan digital dan konsumsi di pusat-pusat perbelanjaan modern. Menurut Prasetyo (2020), budaya populer ini membentuk

generasi baru yang lebih mengidentifikasi diri dengan gaya hidup global ketimbang budaya lokal sungai. Proses ini disebut sebagai “kulturalisasi kapitalisme”, di mana nilai ekonomi dan modernitas menggantikan nilai tradisi dan komunitas (Prasetyo, 2020, hlm. 88).

Dari sisi kebijakan, belum terdapat kebijakan yang terintegrasi antara pelestarian budaya dan penataan ruang kawasan sungai. Banyak program pemerintah masih bersifat proyek jangka pendek dan tidak melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Misalnya, dalam pembangunan trotoar atau jalur pedestrian di tepian Sungai Musi, kerap kali tidak dilakukan kajian etnografis atau sosial budaya mengenai dampaknya terhadap kehidupan warga bantaran sungai. Hal ini menyebabkan proyek-proyek revitalisasi cenderung berorientasi pada estetika visual kota ketimbang revitalisasi sosial dan budaya (Sihombing & Fitri, 2021, hlm. 54).

Meskipun demikian, beberapa inisiatif komunitas telah muncul sebagai respons terhadap ketimpangan kebijakan tersebut. Misalnya, Komunitas Musi Bersih dan Komunitas Rumah Rakit Palembang melakukan edukasi lingkungan dan dokumentasi budaya sungai secara mandiri. Mereka mengadakan pembersihan sungai rutin, lokakarya sejarah budaya air, dan kampanye media sosial untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap Sungai Musi. Gerakan akar rumput ini menunjukkan adanya potensi besar dalam masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam revitalisasi budaya sungai, jika diberi ruang dan dukungan oleh pemerintah (Nugroho, 2021, hlm. 133).

Lebih jauh, pendekatan pariwisata budaya juga menjadi salah satu strategi yang potensial dalam merevitalisasi budaya sungai. Namun, pendekatan ini harus hati-hati agar tidak terjebak dalam “komodifikasi budaya”, yaitu menjadikan budaya lokal hanya sebagai tontonan bagi wisatawan tanpa makna mendalam bagi komunitas lokal. Idealnya, wisata budaya sungai harus bersifat partisipatif dan berbasis komunitas, sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga setempat, sekaligus memperkuat identitas kultural mereka (Utami, 2023, hlm. 110).

Revitalisasi budaya sungai juga membutuhkan dukungan dari sektor pendidikan. Kurikulum lokal di sekolah-sekolah di Palembang dapat memasukkan muatan budaya air dan sejarah Sungai Musi sebagai bagian dari pembelajaran. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya mengenal sungai dari aspek fisik, tetapi juga dari dimensi historis dan simboliknya. Pendidikan menjadi alat penting untuk membangun kembali hubungan kultural antara masyarakat dan sungai dalam jangka panjang (Anisa, 2020, hlm. 97).

Secara keseluruhan, dinamika krisis dan revitalisasi budaya sungai di era modern mencerminkan tarik-ulur antara modernitas dan tradisi. Di satu sisi, modernisasi membawa tantangan terhadap kelestarian budaya air; di sisi lain, ia juga menciptakan peluang untuk membangun pendekatan baru yang lebih inklusif, ekologis, dan partisipatif dalam mengelola ruang sungai. Sungai Musi, dengan segala sejarah dan potensinya, tetap memiliki peluang untuk menjadi pusat peradaban budaya yang adaptif terhadap zaman, asalkan kebijakan dan kesadaran masyarakat terus disinergikan secara berkelanjutan (Hendrawan, 2020, hlm. 68).

KESIMPULAN

Sungai Musi memainkan peran sentral dalam pembentukan sejarah, budaya, dan identitas Kota Palembang sejak masa Sriwijaya hingga era modern. Kajian ini menunjukkan bahwa perubahan fungsi Sungai Musi dari ruang hidup masyarakat, pusat perdagangan dan spiritualitas, hingga menjadi instrumen kontrol kolonial bukan sekadar akibat modernisasi alamiah, melainkan hasil intervensi kekuasaan yang membentuk ulang relasi sosial, ekonomi, dan ruang kota. Dampak historis dari proses tersebut masih terasa dalam bentuk degradasi ekologis dan terpinggirkannya budaya sungai di Palembang kontemporer. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian Sungai Musi harus dipahami sebagai upaya rekonstruksi historis dan kultural, bukan hanya konservasi lingkungan semata. Oleh karena itu, sejarah Sungai Musi memberikan pelajaran penting bahwa keberlanjutan masa depan Palembang sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan warisan budaya sungai ke dalam kebijakan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, T. (2012). *Islam dan masyarakat: Pantulan sejarah Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Abeyasekere, S. (1987). *Palembang: History of a Sumatra city from the late 18th century to the mid-20th century*. Brill.
- Andaya, B. W. (1975). *The heritage of Arung Palakka: A history of South Sulawesi in the seventeenth century*. Oxford University Press.
- Andaya, L. Y. (2008). *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. University of Hawaii Press.
- Anisa, R. (2020). Pendidikan budaya air dalam pembelajaran lokal Palembang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Lokal*, 4(2), 97–105.
- Ashworth, G. J., Graham, B., & Tunbridge, J. E. (2007). *Pluralising pasts: Heritage, identity and place in multicultural societies*. Pluto Press.
- Bapedalda Sumsel. (2021). *Laporan kondisi kualitas air Sungai Musi*. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Boomgaard, P. (2007). *A world of water: Rain, rivers and seas in Southeast Asian histories*. KITLV Press.
- Coedès, G. (1968). *The Indianized states of Southeast Asia* (W. F. Vella, Trans.). University of Hawaii Press.
- Creese, H. (2004). *Women of the Kakawin world: Marriage and sexuality in the Indic courts of Java*. M.E. Sharpe.
- Dahlan, H. (2020). Memori kolektif dan ruang publik: Pelestarian budaya Palembang di tepian Sungai Musi. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(1), 34–45.
- De Casparis, J. G. (1975). *Indonesian palaeography: A history of writing in Indonesia from the beginnings to c. A.D. 1500*. Brill.
- Elson, R. E. (2008). *The idea of Indonesia: A history*. Cambridge University Press.

- Fitrani, E., & Mahmud, M. (2022). Waterfront city dan pembangunan berkelanjutan di Palembang. *Jurnal Tata Ruang Kota*, 6(1), 102–113.
- Gallop, A. T. (2019). Visualisasi kekuasaan kolonial di wilayah sungai. *Jurnal Kajian Kolonialisme*, 4(2), 39–45.
- Hall, K. R. (1985). *Maritime trade and state development in early Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Hanafiah, A. (2010). *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam*. Pustaka Palembang.
- Hasan, S. (2017). Tradisi sungai dan arsitektur rumah limas Palembang. *Jurnal Warisan Budaya*, 3(1), 51–59.
- Hendrawan, R. (2020). Strategi revitalisasi budaya Sungai Musi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(2), 62–70.
- I-Tsing. (2005). *Catatan perjalanan I-Tsing* (Terjemahan). Penerbit Komunitas Bambu.
- Kahin, George McTurnan. (2003). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Kurniawan, D. (2019). Sungai Musi dalam sejarah dan budaya Palembang. *Jurnal Kajian Sejarah Lokal*, 2(1), 87–94.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang budaya 1 – Batas-batas pembaratan*. Gramedia.
- Lubis, N. (2003). *Palembang dalam lintasan sejarah: Politik, ekonomi dan budaya*. LIPI Press.
- Manguin, P. Y. (1993). Palembang and Sriwijaya: An early Malay harbour-city rediscovered. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 66(1), 23–46.
- Manguin, P.-Y. (2012). *Sriwijaya and the City of Palembang: A Reconsideration of the Historical Evidence*. In T. O. Pryce (Ed.), *Lost Kingdoms: Hindu-Buddhist Sculpture of Early Southeast Asia, 5th to 8th Century* (pp. 65–77). The Metropolitan Museum of Art.
- Marzuki, A. (2019). Alienasi masyarakat bantaran sungai. *Jurnal Etnografi Perkotaan*, 2(2), 118–125.
- Miksic, J. N. (2013). *Singapore and the Silk Road of the sea, 1300–1800*. NUS Press.
- Miksic, J. N. (2017). *Sriwijaya: Palembang as Southeast Asia's maritime crossroads*. NUS Press.
- Munoz, P. M. (2006). *Early kingdoms of the Indonesian archipelago and the Malay peninsula*. Editions Didier Millet.
- Nas, Peter J.M. (2002). *The Indonesian Town Revisited*. LIT Verlag.
- Nugroho, A. (2021). Komunitas dan pelestarian budaya air di Palembang. *Jurnal Partisipasi Masyarakat*, 4(2), 132–138.
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812.

- Prasetyo, A. (2020). Kulturalisasi kapitalisme dalam masyarakat sungai Palembang. *Jurnal Budaya Kontemporer*, 1(2), 84–91.
- Reid, Anthony. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680*. Yale University Press.
- Reid, A. (2011). *To Nation by Revolution: Indonesia in the 20th Century*. Silkworm Books.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Rohendi, A. (2017). Sungai Musi dan transformasi ruang kota Palembang. *Jurnal Arsitektur Nusantara*, 5(1), 41–48.
- Sihombing, R., & Fitri, N. (2021). Evaluasi kebijakan revitalisasi kawasan sungai di Palembang. *Jurnal Tata Ruang dan Kebijakan Kota*, 7(1), 50–59.
- Sulastri, & Hasan, S. (2020). Degradasi budaya sungai Musi dan potensi revitalisasi. *Jurnal Warisan Kota*, 2(1), 55–60.
- Suryanegara, A. (2013). *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam, Nasionalisme, dan Demokrasi*. Bandung: Mizan.
- Susanto, M. (2018). Pendidikan nilai budaya lokal di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 89–95.
- Tauchid, D. (1981). *Masalah agraria: Suatu tinjauan historis dan yuridis*. CV. Rajawali.
- UNESCO. (2008). *Operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention*. World Heritage Centre.
- Utami, D. (2023). Komodifikasi budaya dalam wisata sungai. *Jurnal Pariwisata Budaya*, 6(1), 105–113.
- Wheatley, P. (1983). *Nagara and commandery: Origins of the Southeast Asian urban traditions*. University of Chicago Press.
- Wijaya, E. (2021). Festival Sungai Musi sebagai strategi pelestarian budaya. *Jurnal Kebudayaan Lokal*, 4(2), 75–81.
- Widiastuti, L. (2019). Pelestarian kawasan budaya tepian Sungai Musi. *Jurnal Arsitektur dan Budaya*, 5(1), 22–30.
- Wolters, O. W. (1967). *Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Sriwijaya*. Cornell University Press.
- Wolters, O. W. (1982). *History, culture, and region in Southeast Asian perspectives*. SEAP Publications.